



PENINGKATAN KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA

Aryoijati Arripandanto*

Abstrak

Indonesia dan Australia mengadakan pertemuan 2+2 Foreign and Defence Minister's Meeting pada 27 Agustus 2025 yang salah satunya menyepakati peningkatan kerja sama pertahanan demi stabilitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Mengingat hubungan bilateral kedua negara selama ini sangat dinamis, maka perlu dikaji bagaimana sebaiknya kerja sama pertahanan itu ditindaklanjuti oleh Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang perlu ditempuh Indonesia dalam mengimplementasikan agenda 2+2 terutama dalam bidang pertahanan bagi keamanan kawasan. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya peningkatan kerja sama maritim, latihan gabungan tiga matra, penyusunan roadmap kerja sama dalam interoperabilitas untuk keamanan maritim di kawasan, serta menindaklanjuti spirit pertemuan 2+2 dalam forum yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. Komisi I DPR RI perlu mengawasi agar kerja sama Indonesia-Australia di bidang pertahanan sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Pendahuluan

Pada 27 Agustus 2025 diadakan pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia - Australia yang dinamakan 2+2 Foreign and Defence Minister's Meeting di Canberra, Australia. Menhan Australia Richard Marles mengapresiasi kehadiran Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menlu RI Sugiono. Marles menekankan kedudukan strategis Indonesia bagi Australia dalam perspektif geografis maupun keamanan. Menhan Australia juga membahas Defence Cooperation Agreement (DCA) yang telah ditandatangani pada 2024 sebagai bukti penguatan hubungan pertahanan Indonesia-Australia ("Menlu dan Menhan Indonesia-Australia", 2025).

Sejumlah usulan pengembangan kerja sama disampaikan dalam pertemuan tersebut. Menlu Australia Penny Wong menyampaikan inisiatif baru seperti kerja sama maritim, kemitraan untuk perdamaian dan stabilitas, serta peningkatan kerja sama di kawasan Pasifik, serta

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: aryoijati.ardipandanto@dpr.go.id.

menyoroti komitmen bersama dalam mendukung proses perdamaian di Timur Tengah (“Menlu dan Menhan Indonesia-Australia”, 2025). Sementara itu, Menhan RI mengusulkan penguatan kerja sama pertahanan termasuk kemungkinan pertemuan trilateral Indonesia - Papua Nugini - Australia, kerja sama pertahanan darat, pelatihan pasukan khusus kontra-terorisme, serta pengembangan latihan gabungan tiga matra. Menlu RI direncanakan melakukan pertemuan terpisah dengan Menlu Penny Wong untuk membicarakan mengenai penguatan hubungan bilateral Indonesia-Australia, termasuk kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi (“Perkuat Kemitraan Strategis”, 2025). Tulisan ini akan menganalisis peningkatan kerja sama pertahanan yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam hubungannya dengan Australia. Diharapkan kerja sama pertahanan Indonesia-Australia akan menuju pada kerja sama yang semakin efektif dan memperkuat pertahanan di Indonesia.

Kerja Sama Pertahanan untuk Stabilitas Kawasan

Menlu RI Sugiono berpandangan bahwa pertemuan 2+2 RI-Australia memiliki arti strategis bagi hubungan kedua negara, khususnya pada sektor politik luar negeri dan pertahanan, serta upaya bersama dalam memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua negara menyepakati Kemitraan Indonesia-Australia untuk perdamaian dan stabilitas sebagai salah satu upaya bersama dalam menjaga stabilitas kawasan (“Perkuat Kemitraan Strategis”, 2025).

Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu titik fokus geopolitik global, dengan berbagai kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Wilayah ini menjadi vital bagi perdagangan dan stabilitas global karena menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik yang memainkan peran penting dalam rantai pasok global dan rute perdagangan maritim utama seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan (Emmers, R., 2021). Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu pusat ketegangan geopolitik global yang terus meningkat, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa terlibat dalam upaya memperkuat pengaruh dan kepentingan strategis mereka. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan jalur laut strategis, Indo-Pasifik menjadi medan persaingan geopolitik yang semakin kompleks (Ermaya, 2024).

Kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan telah terjalin cukup lama dan mengalami dinamika naik-turun seiring waktu. Dinamika itu terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara terkait sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan (Kadarudin, 2019).

Pada awalnya kesadaran perlunya penguatan kerja sama untuk kestabilan kawasan di tengah hubungan bilateral Indonesia - Australia yang mengalami “pasang-surut” itu

melahirkan kesepakatan *Lombok Treaty* yang ditandatangani pada 13 November 2006. *Lombok Treaty* merupakan kemitraan resmi pertama antara Indonesia dan Australia yang meliputi bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan *Lombok Treaty*, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung integritas teritorial dan menahan diri dari penggunaan kekuatan (Parliament of Australia, 2006). *Lombok Treaty* juga merupakan wujud kesadaran kedua negara untuk bekerja sama melindungi kawasan dari segala bentuk kegiatan yang mengancam stabilitas, kedaulatan wilayah pihak lain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme (Kadarudin, 2019).

Pada 29 Agustus 2024 kedua negara menandatangani *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang dilakukan untuk meningkatkan kerja sama praktis dan memperkuat interoperabilitas (berbagi-pakai data/informasi) antara angkatan bersenjata di berbagai bidang. Kerja sama yang dikembangkan adalah dalam keamanan maritim, konterorisme, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana, dukungan logistik, pendidikan dan pelatihan, serta industri pertahanan. Kedua negara juga berupaya membangun kepercayaan melalui dialog transparan dan kolaborasi nyata (Edna Caroline Pattisina, 2024).

Tindak Lanjut Pertemuan 2+2

Pada pertemuan 2+2 Indonesia-Australia, Menhan Australia menyatakan bahwa kerja sama pertahanan merupakan pilar utama hubungan kedua negara. Australia berkomitmen untuk mendorong penguatan DCA ke tingkat berikutnya, termasuk kerja sama pertukaran informasi, peningkatan kepercayaan institusional pertahanan, serta kolaborasi industri pertahanan. Menhan Australia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Informasi Geospasial Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Maritime Domain Awareness (“Menlu dan Menhan”, 2025).

Berdasarkan hasil pertemuan 2+2 Indonesia-Australia, tampak bahwa kedua negara pada momentum ini sama-sama mengedepankan penguatan pertahanan yang dikhawatirkan pada keamanan maritim. Hal ini semakin relevan mengingat kedua negara ini merupakan anggota aktif *International Maritime Organization* (IMO). Organisasi ini menjadi wadah Indonesia dan Australia untuk bekerja sama dalam mengatasi isu-isu kemaritiman bersama yang ada di Indo-Pasifik, terutama perbatasan laut Indonesia dan Australia. Pertemuan 2+2 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja sama dalam penegakan hukum maritim dan keamanan laut untuk menjaga perairan regional yang aman dan stabil. Selain itu, kerja sama dalam keamanan maritim Indonesia dan Australia dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya di laut dan ekosistem laut yang penting bagi Indonesia.

Oleh sebab itu, Indonesia bersama Australia perlu segera menyusun agenda kerja sama pengamanan maritim yang dapat diwujudkan dalam kegiatan pengamanan maritim



seperti patroli bersama untuk keamanan kawasan dari berbagai ancaman. Indonesia dan Australia juga perlu segera menyusun perencanaan teknis program latihan gabungan tiga matra (darat, laut, udara) secara berkelanjutan, di mana porsi latihan untuk Angkatan Laut dapat diberikan intensitas yang lebih tinggi. Kedua negara juga perlu segera menyusun *roadmap* implementasi DCA dengan fokus pada interoperabilitas dan kontra-terorisme untuk keamanan maritim di kawasan.

Indonesia dan Australia juga perlu mendorong peningkatan kerja sama industri pertahanan yang diarahkan pada aspek kemaritiman, misalnya pemutakhiran kapal patroli atau sistem informasi maritim untuk memperkuat sarana-prasarana pertahanan maritim. Selain itu, Indonesia bersama Australia perlu mempersiapkan teknis dan program kerja sama yang berkelanjutan antara Bakamla dan Badan Informasi Geospasial dengan *Maritime Border Command* sebagai lembaga utama keamanan maritim Australia untuk menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia juga perlu segera menindaklanjuti inisiasi pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan trilateral Indonesia - Papua Nugini - Australia untuk memperkuat kerja sama bagi kestabilan kawasan khususnya dalam aspek keamanan maritim. Secara umum, Indonesia juga perlu mengintegrasikan spirit hasil pertemuan 2+2 ke dalam kerangka ASEAN sehingga Indonesia tidak dipandang memiliki eksklusivitas atau keberpihakan pada kekuatan tertentu. Dengan demikian, Indonesia juga dapat mendorong negara-negara ASEAN untuk melakukan kerja sama dalam memperkuat stabilitas kawasan dalam bidang pertahanan maritim.

Penutup

Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa setiap langkah implementasi hasil pertemuan 2+2 Indonesia-Australia tidak hanya berorientasi pada kepentingan bilateral, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang terukur, inklusif, dan konsisten terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat menjadikan kerja sama pertahanan dengan Australia sebagai model kemitraan yang konstruktif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan, khususnya dalam bidang keamanan maritim.

Komisi I DPR RI perlu mengawasi tindak lanjut Pemerintah RI atas hasil pertemuan 2+2 Indonesia-Australia dalam peningkatan kerja sama pertahanan demi kestabilan kawasan terutama dalam bidang keamanan maritim yang telah disepakati. Hal ini untuk memastikan agar kerja sama pertahanan itu tetap dalam koridor sikap politik luar negeri Indonesia yang bersifat non blok demi stabilitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.



Referensi

- Emmers, Ralf. (2021). Geopolitics and maritime territorial disputes in East Asia. Routledge, 68.
- Ermaya. (2024, Oktober 10). Tantangan geopolitik Indonesia: Mewaspadai perang Indo-Pasifik. *nasional.kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/16192691/tantangan-geopolitik-indonesia-mewaspadai-perang-indo-pasifik?page=all>.
- Kadarudin. (2019, Desember 4). Inkonsistensi implementasi Lombok Treaty Indonesia-Australia. *jurnalone.id*, <https://www.jurnalone.id/inkonsistensi-implementasi-lombok-treaty-indonesia-australia/>.
- Menlu dan Menhan Indonesia-Australia gelar pertemuan 2+2, Bahas penguatan pertahanan dan diplomasi. (2025, Agustus 29). *kemhan.go.id*, <https://www.kemhan.go.id/2025/08/29/menlu-dan-menhan-indonesia-australia-gelar-pertemuan-22-bahas-penguatan-pertahanan-dan-diplomasi.html>.
- Parliament of Australia. (2006). Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the framework for security cooperation. *aph.gov.au*, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Commmittees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf.
- Pattisina, Edna Caroline. (2024, Agustus 29). Kerja sama RI-Australia ditingkatkan, Prabowo: Jaga stabilitas Asia Pasifik. *kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/saling-menghormati-kepentingan-nasional-australia-indonesia>.
- Perkuat Kemitraan Strategis, Menlu Sugiono beserta Menhan RI pimpin pertemuan 2+2 RI-Australia. (2025, Agustus 27). *kemlu.go.id*, <https://www.kemlu.go.id/berita/berita/perkuat-kemitraan-strategis-menlu-sugiono-bersama-menhan-ri-pimpin-pertemuan-22-ri-australia?type=publication>.

